

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Sikap Nasionalisme

a. Konsep Sikap

Menurut Muhibbin Syah (dalam Baharuddin, 2012:24-25) sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Sedangkan menurut Myers (dalam Sunardi, 2002:12) bahwa sikap didefinisikan “ *attitude is a favorable or unfavorable evaluative reaction to word something or someone, exhibited in one’s belief, feelings or intended behavior.*”

Dari definisi tersebut terlihat bahwa ciri khas sikap adalah (1) mempunyai objek tertentu (orang, perilaku, konsep dll.); (2) mengandung penilaian (setuju - tidak setuju, suka - tidak suka). Perbedaannya terletak pada terjadi dan penerapannya. Dalam proses terjadinya, sikap adalah sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan, oleh karena itu sikap dapat dipengaruhi, dibentuk dan diubah.

Saifuddin Azwar (2012:4-5) mengelompokkan pengertian sikap yang diambil dari para tokoh psikologi dalam tiga kelompok kerangka pemikiran, yaitu : (1) kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi, menurut mereka, sikap merupakan bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut; (2) kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi sosial dan psikologi kepribadian yang menurut mereka sikap adalah kesiapan untuk memberikan respon terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud adalah kecenderungan potensial untuk merespon dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu rangsangan; (3) kelompok yang berorientasi

kepada skema triadik (*triadic scheme*), yaitu sikap diartikan sebagai konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek.

Jalaluddin Rakhmat (dalam Sunardi, 2002:14) menyimpulkan beberapa hal tentang sikap, yaitu : (1) sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap dibedakan dengan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku terhadap objek sikap, yaitu meliputi benda, situasi, orang lain, atau gagasan; (2) sikap mempunyai daya pendorong dan motivasi. Sikap menentukan apa yang disukai - tidak disukai, diharapkan, diinginkan, bahkan apa yang perlu dihindari; (3) sikap bersifat relatif lebih menetap; (4) sikap mengandung aspek evaluatif; (5) sikap timbul dari pengalaman, merupakan hasil dari belajar, sehingga dapat dipertahankan atau diubah; (6) sikap terdiri dari komponen kognitif, afektif, dan behavioral.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap antara lain : (1) pengalaman pribadi; (2) pengaruh orang lain yang dianggap penting; (3) pengaruh kebudayaan; (4) media massa; (5) lembaga pendidikan dan lembaga agama; (6) pengaruh faktor emosional (Azwar, 2012:23-38). Sedangkan menurut Gerungan (dalam Sunardi, 2002:22) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap ada dua, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah pengamatan dan penangkapan individu yang senantiasa melibatkan suatu proses pilihan antara keseluruhan dari rangsangan-rangsangan objektif di luar dirinya. Kemudian, faktor ekstern, sikap dibentuk dalam interaksi dengan kelompok, di mana terdapat hubungan timbal balik dan komunikasi di mana hadir pengaruh-pengaruh langsung dari satu pihak saja.

b. Nasionalisme

Definisi nasionalisme sangat beragam, salah satunya adalah pandangan Kohn (1961:11) bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang

berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hobsbawn (1992:9) yaitu nasionalisme adalah suatu prinsip yang beranggapan bahwa unit politik dan nasional hendaknya selaras. Romein sendiri melukiskan sejarah timbulnya nasionalisme, yaitu nasionalisme sebagai bentuk cinta kepada tempat kelahiran (Romein, 1956:73).

Definisi nasionalisme secara hiperbola dan personifikasi dikemukakan juga oleh Tom Nairn (dalam Anderson, 2008:7) seorang pengkaji nasionalisme mengemukakan bahwa nasionalisme adalah patologi sejarah pembangunan modern, tak bisa dielakkan sama seperti neurosis dalam sesosok pribadi, lengkap dengan kemenduaan asasi yang melekat padanya, dengan kemampuan yang sudah ditentukan untuk turun dalam sebuah kegilaan, berakar pada dilema ketidakberdayaan yang disorongkan ke hadapan sebagian besar jagat ini dan umumnya tak mungkin disembuhkan. Lain daripada itu beberapa tokoh lain seperti Nagel dan Enloe (dalam Aulia, 2012:3) menyebutkan bahwa istilah nasionalisme juga bermakna relasi gender, menurut Nagel bahwa nasionalisme lebih banyak didominasi oleh maskulinitas, alasan pertama adalah bahwa nasionalisme selalu tidak dapat dilepaskan dari sosok laki-laki yang kuat dan tangguh, kedua adalah budaya nasionalis terbentuk dalam budaya yang lebih bersifat patriarki, patriotik dan dan berani. Tetapi teori ini kemudian dibantah oleh Annie Pohlman (dalam *Historia*, 2011 : 13) yang mengemukakan bahwa dalam nasionalisme terdapat relasi yang saling bersinergi antar gender.

Sedangkan Anderson sendiri (2008:8) mengemukakan bahwa bangsa atau nasion merupakan komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa adalah sesuatu yang berada dalam bayang karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain. Grosby berpendapat bahwa istilah nasionalisme merujuk pada sebuah keyakinan pada sekelompok bangsa, yang keyakinan itu akan berbeda-beda sesuai dengan karakternya, karena itu setiap bangsa akan memiliki perbedaan

nasionalisme, dan terkadang saling berkompetisi karena perbedaan itu dan sering dimanifestasikan dalam perbedaan politik (Grosby, 2011:6).

Mengenai perbedaan karakter nasionalisme ini, Kartodirdjo menjelaskan secara lebih spesifik perihal nasionalisme Indonesia, yaitu : Dalam mempelajari nasionalisme Indonesia sebagai fenomena historis sebenarnya di samping menggunakan perspektif diakronis juga ada keharusan memakai perspektif sinkronis, tidak lain karena nasionalisme pada hakikatnya, bersifat kompleks, sehingga hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan pelbagai konteksnya, ekonomis, sosial, politik, kultural, dan lain sebagainya, jadi perlu ditempatkan dalam sistem kontemporeranya (Kartodirdjo, 1999:26).

Hal tersebut dapat dimengerti, karena memang untuk mengerti terintegrasinya bangsa ini, secara logis hanya dapat dimengerti melalui sejarah nasional yang menjelaskan proses sosiogenesis negara nasion Indonesia sejak “awal abad ke-20” (Kartodirdjo, 1999:26), sejak dalam kurun waktu tersebut karena nasionalisme Indonesia lahir sebagai nilai-nilai yang sengaja diformulasikan sebagai antitesa terhadap dominasi kolonialisme Belanda oleh sekelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki identitas masing-masing yang terpisah (Purwanto, 2006:155, hal yang sama diungkapkan juga oleh Tuahunse dalam *Jurnal Inovasi, Volume 5 No. 2 Juni 2008*) dan mulai menyadari akan pentingnya nasionalisme dengan membangun pergerakan-pergerakan politik yang modern (Anshoriy, 2008:110-111).

Nasionalisme dalam perkembangannya, sebagaimana yang diungkapkan Azra (2011, 118-125) mengemukakan mengenai nasionalisme Indonesia yang tumbuh dalam tiga fase, yaitu *tahap pertama* adalah pertumbuhan awal dan kristalisasi gagasan nasionalisme. Fase ini ditandai dengan penyerapan gagasan nasionalisme yang selanjutnya diikuti pembentukan yang disebut Benda dan McVey serta Hobsbawn sebagai “protonasionalisme” yang muncul pada dekade awal abad-20. *Tahap kedua*, pada fase ini nasionalisme sangat sarat dengan muatan politis ketimbang

sosial dan kultural. Tema pokok nasionalisme di sini adalah apa yang disebut pemimpin nasionalis (Soekarno) sebagai '*nation and character building*', yakni memupuk keutuhan dan integritas negara dan bangsa. Fase ini terbangun terutama ketika masa pendudukan Jepang di awal pertengahan abad-20 dan dalam perkembangan menjelang kemerdekaan terbina suatu nasionalisme politik (*political nationalism*) yang terkait dengan pembentukan *nation state*. Tahap ketiga, pada fase ini ditandai dengan nasionalisme ekonomi (Orde Baru), nasionalisme politik sesegera mungkin diselesaikan dan meredam nasionalisme politiknya.

Pembagian masa perkembangan nasionalisme dan integrasi ini juga dikemukakan oleh Mulyoto (dalam *Historia*, 2011:9) yaitu masa revolusi fisik tahun 1945-1949 (*stage of the revolution*), fase pasca-revolusi fisik tahun 1950-1965 (*Post-revolutionary phase*), fase Orde Baru tahun 1966-1998 (*phase new order*), dan masa setelah Orde Baru (*advanced phase*). Fase pertama nasionalisme lebih bersifat perlawanan terhadap kolonialisme, sedangkan fase kedua lebih bersifat nasionalisme ekonomi, fase ketiga merupakan fase panjang yang lebih menitikberatkan pada pembangunan, dan fase keempat yang ditandai dengan adanya krisis ekonomi dan politik.

Seiring berjalannya waktu konsep nasionalisme Indonesia, kini mulai terdapat penyesuaian-penyesuaian, tetapi tetap pada hakikat nasionalisme yang sama yaitu kesatuan (Soewarsono, 2011:97). Sudarsono menjelaskan bahwa nasionalisme kini tidak lagi diasumsikan sebagai nasionalisme klasik oleh generasi baru. Konsep nasionalisme klasik adalah konsep cinta pada tanah air yang ada di zaman Soekarno tahun-50an yang melarang setiap jengkal tanah kita diinjak oleh bangsa lain. Tetapi kini fenomenanya telah berbeda. Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia tidak bisa berpandangan kaku pada nasionalisme klasik terus menerus, bahkan Indonesia sendiri merasa berkepentingan dengan itu. Para generasi baru sekarang ini mulai memikirkan bagaimana memaknai nasionalisme berdasarkan cara mereka sesuai dengan perkembangan zaman (Sudarsono, 2011:vii).

Konsep nasionalisme Indonesia ini yang oleh Lemhannas RI dipopulerkan dengan istilah Jiwa Nasionalisme Ke-Indonesia-an. Konsep serupa yang dikemukakan oleh Soewarsono, menurut Lemhannas dapat terwujud salah satunya dengan pengkajian sejarah, sistem nilai, struktur sosial dan yang terpenting adalah pemantapan semangat nasionalisme melalui pembentukan kesadaran kebangsaan, yang di masa lalu terwujud dalam menghadapi kolonialisme Belanda sejak tahun 1908 sampai dengan tahun 1945 (*Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 14, Desember 2012 : hal 117*).

Pendidikan sejarah dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting terkait dengan nasionalisme. Sebagaimana yang diungkapkan oleh S. Hamid Hasan (dalam *Historia*, 2011:54) bahwa salah satu konten atau isi dari pendidikan sejarah adalah menunjukkan nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, revolusioner, patriotik, dan nasionalisme. Berpijak pada uraian di atas maka dalam penelitian ini dapat ditarik indikator dari sikap nasionalisme antara lain:

- Pengakuan dan penghargaan terhadap identitas bangsa Indonesia, seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, budaya bangsa, serta ideologi negara.
- Penerimaan terhadap prinsip-prinsip perbedaan dalam kehidupan seperti kebhinekaan, tidak mementingkan golongan, konsep Empat Pilar Kebangsaan.
- Menentang segala bentuk ketidakadilan, imperialisme dan kolonialisme.
- Kerelaan berkorban untuk bangsa dan negaranya, kecintaan terhadap tanah airnya, berjiwa patriot dan cinta kebenaran, serta senantiasa mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Kesadaran Sejarah

a. Konsep Kesadaran dan Sejarah

Kesadaran yang dimiliki manusia merupakan bentuk unik di mana manusia dapat menempatkan dirinya sesuai dengan yang diyakininya. Refleksi merupakan bentuk dari pengungkapan kesadaran, di mana ia dapat

bertahan atau menyesuaikan diri dalam kondisi tertentu dalam lingkungannya. Setiap pengetahuan atau teori yang dihasilkan oleh manusia merupakan bentuk refleksinya tentang berbagai realitas yang terjadi.

Manusia diberi anugerah oleh Tuhan sebagai makhluk yang memiliki akal. Akal berfungsi untuk berpikir dalam kelangsungan hidupnya, termasuk menyimpan dan mereproduksi pengalaman dalam hidup manusia. Dengan anugerah akal, manusia dapat kapan saja menghadirkan berbagai pengalaman hidupnya, baik yang bersifat individual maupun pengalaman yang bersifat kolektif. Maknanya ialah bahwa dalam menjalani dan menghayati hidupnya secara sadar manusia mengetahui apa yang dialami, dilihat, didengar dan dirasakan. Melalui akal dan memori manusia memiliki kesadaran akan pengalaman masa lalunya (Daliman, 2012:38).

Manusia memiliki kesadaran yang mendalam atas masa lalu atau sejarahnya adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat ditemukan dalam makhluk lainnya. Oleh sebab itu, kesadaran yang sesungguhnya dari manusia adalah termasuk menyadari bahwa ia juga merupakan makhluk sejarah (Latief, 2006:43). Sedangkan sejarah dalam arti sederhana adalah masa lampau umat manusia (Gottschalk, 2008:33). Sejarah merupakan sejumlah perubahan- perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa yang secara nyata terjadi dalam lingkungan sekitar kita (Ali, 2005:13). Maka kini jelaskan bahwa sejarah merupakan cerita, realitas tentang pengalaman manusia dimasa lampau.

Terkait dengan uraian di atas, menurut Soedjatmoko (1990:67-69), kesadaran sejarah berarti sadar akan kelampauan, bebas dalam kekinian, dan bertanggung jawab untuk menentukan ke-akanan. Dengan demikian maka kesadaran sejarah berarti mempelajari masa lampau sebagai landasan berpijak masa kini dan merencanakan hari depan. Kesadaran sejarah menyangkut pula kesiapan dari dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti dikatakan oleh Soedjatmoko bahwa kesadaran sejarah bukan saja sebagai kesadaran akan kontinuitas melainkan berarti kesadaran akan kemungkinan diskontinuitas di dalam usaha pembangunan.

Ditambahkan pula oleh Soedjatmoko (1986) bahwa kesadaran merupakan orientasi intelektual dan sikap jiwa untuk memahami keberadaan dirinya dalam dinamika kehidupan suatu kelompok masyarakat atau bangsa, sehingga kesadaran sejarah dapat membimbing manusia kepada pengertian tentang diri sendiri dan asal mula dirinya sebagai suatu bangsa, suatu sikap yang perlu untuk memahami kepribadian nasional (Soedjatmoko, dalam Nurcahyo, *Jurnal Agastya* Vol. 02 No. 01. Januari 2012 pp. 21-33). Sementara itu, menurut Kartodirdjo (dalam Arif, 2011:12-13) menjelaskan bahwa kesadaran sejarah merupakan kesadaran diri yang secara imanen ada pada refleksi diri. Kesadaran sejarah akan memperkuat potensi untuk (1) menempatkan potensi diri dalam konteks sosiokultural serta temporal; (2) melepaskan diri dari perhatian kognitif serta kehidupan praktis yang menuntut terselenggaranya fungsi-fungsi normatif-etis dalam menghayati sejarah dengan orientasi teleologis, seperti kepentingan politik dan kebudayaan; (3) membantu mencari jawaban dari permasalahan metahistoris melalui pengembangan masa depan (fungsi prediktif dari studi sejarah).

Kesadaran sejarah dapat pula dimaknai sebagai suatu bentuk kesadaran yang menunjukkan pada satu tingkat penghayatan pada makna dan hakikat sejarah sebagai suatu tuntunan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa kini dan masa yang akan datang (Widja, 2002:10). Kesadaran sejarah sebagai suatu bentuk penghayatan terhadap sejarah juga dapat dipahami bahwa kejadian pada masa kini dipandang sebagai kelanjutan daripada kejadian yang lampau, kejadian masa kini akan mempunyai akibat langsung atas kejadian-kejadian pada masa mendatang (Soedjatmoko, 1985:56).

Ahli filsafat sejarah Jerman, Gadamer (dalam Sjamsudin, 2012:171) mengemukakan bahwa : kesadaran sejarah adalah “kesadaran penuh akan historisitas setiap hal yang ada sekarang (*present*) dan relativitas semua opini.” ... Kesadaran sejarah untuk mengetahui, tidak bagaimana orang-orang (*men*), manusia - manusia (*people*) atau negara-negara berkembang pada umumnya, melainkan bagaimana ini, manusia ini, atau

negara ini menjadi seperti sekarang : bagaimana masing-masing kekhususan-kekhususan ini (*particular*) dapat berlalu dan berakhir secara khusus disitu.

Kesadaran sejarah tidak lain adalah sikap mental, jiwa pemikiran yang dapat membawa untuk tetap berada dalam rotasi sejarah (Latief, 2006:50). Artinya bahwa dengan kesadaran sejarah seharusnya dapat menjadikan manusia semakin arif dan bijaksana, inilah sebenarnya esensi pada ungkapan Gadamer sebelumnya yaitu bukannya bagaimana belajar sejarah tetapi bagaimana belajar dari sejarah. Menurut Ankersmit (1987:350) kesadaran historis yaitu : Kesadaran historis dibayangkan sebagai kesadaran sebagai kesadaran mengenai sifat dunia ciptaan manusia yang selalu berubah-ubah. Kesadaran historis merupakan sepasang kembar siam: dari satu pihak memperlihatkan kebhinekaan berbagai periode dalam masa silam, dari lain pihak mengungkapkan suatu stabilitas, sesuatu yang tak berubah di dalam proses sejarah. Di dalam kesadaran sejarah tercakup dua hal, yaitu kesadaran akan perubahan dan kesadaran akan waktu (Daliman, 2012:39).

Kesadaran akan perubahan kemudian memberikan ciri utama yaitu ontologi dari sejarah itu sendiri, bagaimana hakikatnya, sedangkan kesadaran akan waktu tidak terlepas dari hakikat sejarah yaitu perubahan, yang mencerminkan adanya hal yang lama dan baru dan itu perubahan tak dapat dipisahkan dari kekuasaan waktu. Perubahan hanya terjadi melalui dan dengan waktu. Dengan adanya kesadaran sejarah, sebuah bangsa tidak akan kehilangan nilai-nilai yang sangat dibutuhkan dimanapun dalam keadaan bagaimanapun juga. Nilai-nilai tersebut antara lain nasionalisme, patriotisme, demokratisme, cinta damai dan kejujuran, keadilan, dan lain sebagainya (Latief, 2006:51). Maknanya adalah dengan kesadaran sejarah membuat

b. Indikator Kesadaran Sejarah

Sebagaimana yang telah diuraikan di muka, mengenai berbagai pendapat dan definisi tentang kesadaran sejarah maka dapat diambil pengertian bahwa kesadaran sejarah adalah pemahaman terhadap pengetahuan sejarah, fakta sejarah dan hubungan kausalitasnya, kehadiran

ke dalam alam pikiran tentang penting dan bermaknanya sejarah dalam kehidupan serta kearifan dan kebijaksanaan dalam diri untuk senantiasa menggunakan pengalaman masa lalu sebagai cerminan dan pegangan dalam kehidupan.

Bersandar dari pengertian tersebut, maka dalam mengukur tingkat kesadaran sejarah diperlukan indikator-indikator untuk mengukur tingkat kesadaran sejarah seseorang. Menurut Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Partono, 1991:20-21), menjelaskan bahwa indikator-indikator kesadaran sejarah adalah : (1) pemahaman akan kelemahan dalam kaitannya dengan kekinian; (2) pemahaman masa lampau sebagai sejarah berdasar pada kebenaran bukan mitologi; (3) agregasi dari pengalaman bersama dari satu komunitas terhadap reaksi mereka pada situasi politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain dari masa ke masa; (4) pemahaman terhadap hakekat studi sejarah yakni dialog tiga dimensi antara sejarawan dan sumber sejarah, sejarawan dan sejarawan, sejarawan dan masyarakat, 5) pemahaman terhadap penjernihan sejarah, pemahaman terhadap perlunya kepastian dalam fakta serta citra dan terhadap hal-hal yang kontroversial; (6) pengetahuan tentang fakta sejarah dan hubungan kausalnya; (7) pemahaman keterkaitan masa lampau, masa kini, dan masa depan; (8) tindakan berziarah ke kubur, melacak silsilah keluarga; (9) pemahaman terhadap para tokoh dan pahlawan bangsa; (10) pemahaman terhadap tradisi, penghargaan terhadap peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, penulisan dokumen dan lain-lain.

Berkaitan dengan indikator kesadaran sejarah, G. Mudjanto (dalam Partono, 1991:22) menjabarkan indikator kesadaran sejarah sebagai : (1) peringatan peristiwa penting dengan tanda waktu; (2) catatan harian, otobiografi; (3) membaca hikayat, riwayat, cerita rakyat; (4) menabung, persediaan masa depan; (5) belajar dari pengalaman dan keteladanan; (6) surat wasiat dan pembuatan dokumen; (7) pembuatan monumen; (8) peninggalan, prasasti; (9) pemeliharaan tempat suci dan bersejarah; (10) penyusunan program kerja; (11) bersikap jujur, tidak memalsukan atau

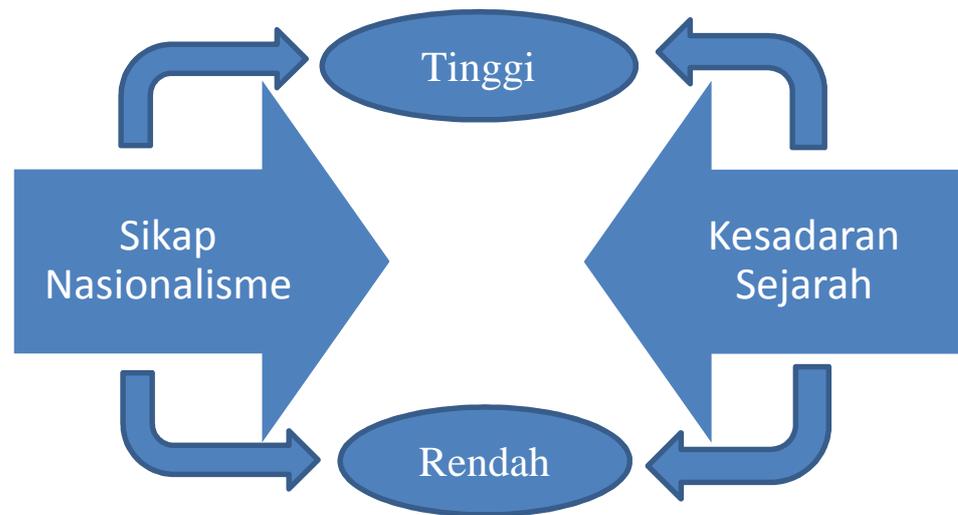
menghilangkan jejak; (12) memelihara benda antik; (13) berkarya dengan baik dan memberi kesan dapat diteladani; (14) berkesadaran dan bersemangat membangun; (15) perayaan ulang tahun/ peringatan hari kelahiran.

Dengan memperhatikan batasan mengenai kesadaran sejarah dan beberapa pendapat tentang indikator kesadaran sejarah, maka indikator kesadaran sejarah dalam penelitian ini adalah : membuat catatan harian, otobiografi dan hal-hal yang berhubungan dengan asal-usul dan pribadinya; membaca hikayat, cerita rakyat, dongeng; menabung sebagai persiapan masa depan; belajar dari keteladanan dan pengalaman; ikut serta dalam pembangunan monumen peringatan peristiwa bersejarah; pemeliharaan tempat suci dan bersejarah; menyusun perencanaan untuk ke depan dan program kerja; memelihara benda antik, kuno; tidak memalsukan atau menghilangkan jejak; dan memperingati hari kelahiran serta hari bersejarah.

B. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa sikap nasionalisme merupakan bentuk dimana seseorang merasa mencintai dan memiliki bangsanya, tanah airnya secara sepenuhnya. Sikap nasionalisme mengantarkan seseorang pada hakikat kebangsaannya, asal-usulnya, dan keinsyafan akan dimana sesungguhnya ia berdiri dan berpijak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diduga bahwa seseorang yang memiliki sikap nasionalisme yang positif akan memiliki kesadaran sejarah yang tinggi. Pada intinya semakin positif sikap nasionalisme mahasiswa maka akan semakin tinggi tingkat kesadarannya, dengan demikian terdapat hubungan positif antara sikap nasionalisme dengan kesadaran sejarah.



Gambar 1.1 Alur berpikir hubungan antar variabel dalam penelitian korelasi.

C. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori serta kerangka pemikiran di atas, maka dapat diberikan jawaban sementara terhadap masalah dalam penelitian ini yaitu dalam hipotesis Terdapat hubungan positif yang signifikan antara Sikap Nasionalisme dengan Kesadaran Sejarah mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Pontianak.